

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Indonesia memiliki sejarah yang sangat menarik baik dalam bidang politik sosial-budaya maupun ekonominya. Dalam sejarahnya Indonesia mengalami pertentangan dalam bidang politik hingga membuat pemerintahan Indonesia berganti dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru. Orde Baru lahir dari suatu pertentangan dalam ruang lingkup nasional. Pertentangan ini terus menerus dan berkelanjutan karena bersifat ideologi politik dan bersumber pada segala bidang kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer (Moertopo, 1974, hlm 15). Pertentangan ini mencapai puncaknya yang dikenal dengan peristiwa G30S.

Gerakan ini dilakukan dengan menculik para pucuk pimpinan AD (Angkatan Darat) yang dianggap menghalangi keinginan PKI yang disampaikan melalui pidato Presiden Ir. Soekarno pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1965 yang mengumumkan poros Jakarta-Pyongyang yang antiimperialis, serta menyatakan bahwa rakyat akan dipersenjatai. Peristiwa penculikan ini dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1965 dan menargetkan ketujuh pucuk pimpinan AD (Ricklef, 2008, hlm 582). Namun hanya 6 pucuk pimpinan AD yang tertangkap karena A.H. Nasution dapat meloloskan diri. Namun, ajudan dan juga anak dari A.H. Nasution menjadi korban dalam penangkapannya.

Gerakan ini dapat dengan segera ditumpas, yaitu dengan menyebarkan isu keterlibatan PKI sebagai aktor utama Gerakan 30 September yang dikembangkan oleh Soeharto. Hal tersebut ternyata mendapat dukungan dan juga simpati kuat dari masyarakat untuk gerakan penumpasan yang dipimpin oleh Soeharto tersebut. Isu yang dikemukakan Soeharto ini menimbulkan perpecahan dalam politik Indonesia (Lubis, 2003, hlm 364-365). Dengan segera ruang gerak dari PKI dibatasi dan para anggota PKI diawasi dengan ketat. Dengan tersebarnya isu

keterlibatan PKI dalam gerakan tersebut membuat kecemasan masyarakat terhadap pemerintah. Setelah Gerakan 30 September ini berhasil ditumpas tidak lantas membuat keadaan Indonesia Stabil. Terjadi banyak demonstrasi yang dilakukan berbagai kalangan. Masyarakat umum diliputi kecemasan akan adanya kesempatan bagi PKI untuk melakukan pemberontakan lagi. Hal ini timbul karena belum adanya penyelesaian secara politik yang dilakukan oleh Presiden Ir. Soekarno terhadap PKI.

Pada tanggal 10 Januari 1966, dengan dipelopori KAMI dimulailah aksi demonstrasi mahasiswa yang mendapat dukungan dari berbagai kalangan dan kesatuan aksi lainnya. Mereka menuntut kestabilan politik-ekonomi di Indonesia. Tuntutan tersebut dinamakan TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi, Bubarkan PKI. Retool kabinet Dwikora dan Turunkan harga/perbaiki ekonomi. Banyak golongan yang terdesak atas aksi TRITURA ini termasuk Presiden Ir. Soekarno (Poesponegoro & Notosusanto, 1993, hlm 403). Untuk menanggapi TRITURA ini, Presiden Ir. Soekarno melakukan *reshuffle* kabinet pada tanggal 21 Februari 1966. Namun, *reshuffle* kabinet tersebut justru menimbulkan kekecewaan rakyat. *Reshuffle* kabinet yang dilakukan oleh Presiden Ir. Soekarno yang disebut penyempurnaan kabinet Dwikora ini banyak menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap menentang Gerakan 30 September seperti A.H. Nasution. Sedangkan orang-orang yang dianggap terlibat justru malah dipertahankan. Ditambah lagi keputusan Presiden untuk membubarkan KAMI dan memberlakukan jam malam. Akibat dari berbagai kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan Presiden justru menimbulkan konflik yang lebih besar dan semakin meruncing di dalam tubuh Indonesia dan juga krisis nasional yang semakin tak terkendali.

Suasana konflik semakin meningkat ketika Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan pernyataan pada 15 Januari 1966 untuk membentuk Barisan Soekarno. Presiden Ir. Soekarno mengundang para tokoh mahasiswa yang sebagian besar bukan pimpinan KAMI. Dalam sidang kabinet itu Presiden Ir.

Soekarno menyatakan, "ini Soekarno, pemimpin revolusi, Presiden Republik Indonesia, siapa yang mau ikut saya, ikutlah. Susunlah barisanmu, jangan bertindak liar. Tunggu komando" (Machmud, 1987, hlm 249). Presiden Ir. Soekarno menganggap bahwa dengan dibentuknya Barisan Soekarno akan membuat suasana politik menjadi stabil. Namun, aksi-aksi yang dilakukan oleh Barisan Soekarno ini justru malah menyerang KAMI. Dengan mengeluarkan pamflet-pamflet yang berujung dengan konflik fisik. Korban pun tak terhindarkan baik dari KAMI maupun dari Barisan Soekarno.

Atas keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Ir. Soekarno memunculkan dukungan dari pihak militer terhadap setiap gerakan mahasiswa. Dengan semakin besarnya krisis nasional yang terjadi dan kedudukan Presiden semakin terancam. Pada saat sidang kabinet di Istana Merdeka Jakarta, Muhammad Jusuf yang merupakan salah satu menteri kabinet datang ke istana. Ketika sidang berlangsung, beredar kabar adanya pasukan tidak dikenal berada di luar istana yang dilengkapi dengan senjata. Serta adanya gerakan mahasiswa dan rakyat yang sudah sampai ke depan istana. Segera secara tiba-tiba Presiden menghentikan sidang dan meninggalkan ruangan untuk pergi ke kediaman Presiden (tersedia :Wikipedia.com [12 Februari 2016]).

Soeharto yang pada saat itu tidak menghadiri sidang berada di kediamannya di jalan Agus Salim karena sakit. Pada sore harinya Soeharto memimpin rapat di markas KOSTRAD. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah keganjilan oleh Soebandrio karena situasi di istana pada saat itu sangat krisis (Adam, 2004, hlm 231). Muhammad Jusuf bersama dengan Basuki Rahmat dan Amir Machmud berencana untuk berkunjung ke kediaman Presiden Ir. Soekarno untuk memberikan dukungan psikologis. Muhammad Jusuf bermaksud agar Presiden Ir. Soekarno tidak merasa ditinggalkan oleh AD. Namun, sebelum berangkat menuju ke kediaman Presiden, Muhammad Jusuf, Basuki Rahmat dan Amir Machmud terlebih dahulu menuju ke kediaman Soeharto untuk melaporkan kondisi saat itu.

Setelah tiba di kediaman Presiden Ir. Soekarno, Muhammad Jusuf, Basuki Rahmat dan Amir Machmud melaporkan keadaan dan krisis yang semakin memuncak di istana negara. Maka mereka menawarkan kepada Presiden Ir. Soekarno untuk mengeluarkan sebuah surat perintah untuk menstabilkan kembali keadaan negara dengan segala daya dan upaya. Mereka menyarankan surat perintah ini ditujukan kepada Letjen Soeharto yang dianggap mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Meskipun harus melalui perdebatan yang sangat panas, akhirnya surat perintah tersebut ditandatangani di depan 3 perwira dan anggota kabinet Dwikora. Surat perintah ini ditanda tangani pada tanggal 11 Maret di Bogor yang dikenal dengan nama Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) (Disjarah TNI AD, 2013, hlm 55). Selanjutnya Supersemar ini dibawakan ke Jakarta oleh ketiga perwira tersebut untuk diberikan kepada Soeharto yang pada waktu itu berkedudukan di Jakarta. Setelah mengetahui isi dari Supersemar tersebut adalah penyerahan kekuasaan kepada Soeharto ketiga perwira tersebut terkejut dan menganggap bahwa ini merupakan sebuah keajaiban. Karena sebelumnya MPRS telah menunjuk Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Namun, Presiden Ir. Soekarno menanggapi Supersemar bukanlah penyerahan kekuasaan, akan tetapi perintah untuk menstabilkan negara.

Untuk menjalankan Supersemar, Soeharto segera melakukan tindakan-tindakan untuk menstabilkan negara. Tindakan pertama yang diambil Soeharto adalah membubarkan dan melarang PKI serta organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun setuju dengannya di seluruh wilayah Indonesia. Tindakan ini direspon oleh berbagai kalangan masyarakat dengan baik dan perlahan pengaruh PKI semakin memudar dan menghilang. Dalam menjalankan tindakan ini Soeharto dibantu oleh banyak kalangan dan banyak perwira yang berperan sangat aktif dalam penumpasan PKI di Indonesia. Termasuk ketiga perwira yang membawa mandat Supersemar kepada Soeharto. Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Soeharto adalah menangkap para Menteri yang terlibat PKI sesuai dengan keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 Menteri yang dinilai terlibat di dalam pemberontakan

G30S/PKI atau memperlihatkan itikad tidak baik dalam penyelesaian masalah itu. Untuk kelangsungan pemerintahan, Soeharto juga mengganti menteri-menteri tersebut hingga terbentuk kabinet yang baru (Poesponegoro & Notosusanto, 1993, hlm 413-414). Dengan pembentukan kabinet baru yang dibentuk oleh Soeharto merupakan awal dari ORBA.

Kiprah politik Soeharto dalam pemerintahan Indonesia semakin cemerlang, terlebih lagi Soeharto dianggap mampu menyelesaikan krisis nasional yang timbul di Indonesia. Soeharto juga mendapat kesempatan menjadi ketua presidium kabinet Ampera yang memberinya wewenang penuh untuk memimpin pemerintahan. Kedudukan Soekarno mulai tergeser sedikit demi sedikit oleh peran serta Soeharto dalam pemerintahan. Ditambah desakan dari NU untuk mengadakan sidang istimewa MPRS pada bulan Maret 1967 guna meninjau kembali kedudukan politik Presiden Ir. Soekarno. Hal ini dikarenakan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto pada tanggal 20 Februari 1967. Dalam situasi politik yang terjadi dan dalam keadaan MPRS mengadili Soekarno yang dianggap tidak dapat menjalankan pemerintahan berdasarkan UUD 1945 maupun ketetapan MPRS, Soeharto muncul dengan gagasannya untuk membentuk sebuah Orde Baru dan meninggalkan Demokrasi Terpimpin (masa Soekarno). Gagasan ini ditanggapi MPRS dengan pengangkatan Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada tanggal 12 Maret 1967 secara aklamasi. Selanjutnya pada sidang yang berlangsung pada 21-31 Maret 1968 dengan menghasilkan setidaknya dua buah keputusan penting. Pertama, yaitu mengangkat Soeharto sebagai Presiden sampai terbentuknya MPR hasil pemilu. Kedua, mengadakan pemilu pada tanggal 5 Juli 1971 (Lubis, 2003, hlm 373-377).

Dalam usaha menstabilkan kehidupan politik, sosial-budaya di Indonesia setelah G30S Presiden Soeharto mengangkat Muhammad Jusuf sebagai Menteri Perindustrian. Muhammad Jusuf yang pada masa Ir. Soekarno menjabat sebagai Menteri Perindustrian juga dianggap memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Terlebih lagi Muhammad Jusuf tidak memiliki hubungan ataupun keterkaitan

dengan G30S. Pada Masa Orde Baru yang mengutamakan pembangunan di segala bidang membuat Muhammad Jusuf harus bekerja lebih keras lagi.

Muhammad Jusuf merupakan salah satu tokoh Demokrasi Terpimpin yang dipertahankan oleh pemerintah Orde Baru. Muhammad Jusuf dianggap mendukung berdirinya Orde Baru dan merupakan salah satu orang yang ikut membentuk Orde Baru. Pembinaan terhadap perkembangan industri di Indonesia sangat diperlukan mengingat Pemerintahan Soeharto merencanakan hal tersebut dalam Pelita. Menteri Perindustrian yang dipegang oleh Muhammad Jusuf memegang peranan penting dalam perkembangan bangsa Indonesia. Peranan suatu sektor perekonomian dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), lazim digunakan untuk mengukur kemajuan sektor tersebut. Demikian juga perkembangan sektor industri, dapat dihitung berdasarkan besar sumbangannya terhadap pembentukan PDB (Siahaan, 2000, hlm 453). Perkembangan sektor industri dalam PDB selama periode pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) antar tahun 1961-1966 dapat dihitung dengan menggunakan data publikasi BPS (Biro Pusat Statistik) pendapatan nasional Indonesia tahun 1960-1968.

Dalam penataan di bidang industri tidaklah mudah mengingat pada masa transisi dari pemerintah Orde Lama ke Orde Baru mengalami krisis ekonomi yang sangat panjang. Maka penataan dalam bidang industri dianggap sebagai salah satu jalan ke luar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penataan industri mikro hingga makro sangat diperlukan untuk mengatasi krisis yang ada. Serta penataan dalam bidang industri juga dianggap akan menyelesaikan masalah banyaknya pengangguran yang terus meningkat.

Sejak tahun 1964-1978, Muhammad Jusuf selalu dipercaya sebagai Menteri Perindustrian. Setelah diangkat sebagai Menteri Perindustrian, tugas pertama dari Muhammad Jusuf adalah membenahi organisasi di departemennya yang sempat terpecah-pecah pada masa Demokrasi Terpimpin. Selanjutnya Muhammad Jusuf mulai melakukan program peningkatan produk-produk

pertanian dan perkebunan. Untuk menunjang terlaksananya program tersebut Muhammad Jusuf perlu untuk meningkatkan Industri Pupuk, semen dan kimia, Industri Tekstil, Industri Pulp, kertas dan percetakan, Industri Farmasi, Industri ringan dan kerajinan tangan, industri logam dan mesin. Program tersebut mendapatkan sebuah kesuksesan yang sangat besar. Inflasi menurun dari 650% menjadi 120% pada tahun 1967, bahkan mencapai 85 % pada tahun 1978 (Sumarkidjo, A, 2006, hlm 119-120). Hal tersebut menunjukkan perkembangan dari industri dan perannya dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dalam menjalankan kedudukannya sebagai Menteri Perindustrian, Muhammad Jusuf mulai memilih dan memilih beberapa proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Demokrasi Terpimpin yang belum selesai. Hasilnya Muhammad Jusuf memilih 4 Proyek Demokrasi Terpimpin yang diselesaikan, yaitu PT Semen Tanosa, Petrokimia Gresik, pabrik kertas di Leces dan pabrik kertas di Gowa. Beberapa perindustrian yang dipilih untuk dilanjutkan dan diselesaikan berkaitan dengan penanaman modal asing yang sudah dilakukan serta disesuaikan dengan politik Orde Baru. Dalam menghadapi Repelita I, Muhammad Jusuf memiliki waktu 1 tahun untuk mempersiapkan orang-orang yang mampu menjalankan program-program dalam lima tahun ke depan. Serta Muhammad Jusuf mencari orang-orang yang bisa mendukungnya dalam pemikiran dan psikologis. Muhammad Jusuf memilih Drs Barli Halim seorang pengajar teknokrat yang pekerja keras dan mempunyai visi dan misi yang sama dengan Muhammad Jusuf (Disjarah TNI AD, 2013, hlm 106). Sewaktu presiden melakukan inspeksi mendadak ke Departemen Perindustrian untuk menyaksikan kesiapan Repelita I cukup puas. Hal ini karena kesiapan Organisasi dan seluruh jajaran Departemen tersebut. Muhammad Jusuf dengan pemilihan staf yang tepat mampu menghilangkan keraguan masyarakat dan Departemen Perindustrian siap menjalankan Repelita I.

Namun, sejak tahun 1978 Muhammad Jusuf diangkat menjadi Panglima Pimpinan ABRI oleh Presiden Soeharto. Hal ini cukup mengejutkan mengingat

Muhammad Jusuf selama 14 tahun sudah tidak berkiprah dalam dunia militer. Meskipun demikian karir militer dari Muhammad Jusuf tidaklah buruk. Muhammad Jusuf sebelum berkiprah dalam dunia politik pernah menjabat sebagai Pangdam XIV Hasanuddin. Muhammad Jusuf memiliki tugas untuk membentuk pengaruh dari gerakan separatis yang dilakukan oleh beberapa gerombolan seperti DI/TII pimpinan Kahar Muzakar dan Permesta. Karena karir Muhammad Jusuf yang dianggap sangat baik dalam bidang militer Presiden Soeharto meminta Muhammad Jusuf untuk beralih tugas menjadi Menhankam/Pangab menggantikan Jenderal Pangabean (Sumarkidjo, 2006, hlm 215). Dalam pemindahan tugas kepada Muhammad Jusuf ini memunculkan berbagai pertanyaan. Muhammad Jusuf yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian yang dianggap mampu mengendalikan pertumbuhan perindustrian dan sukses dalam pembangunan ekonomi justru malah dipindah tugaskan. Apakah Presiden Soeharto merasa tidak puas dengan kinerja dari Muhammad Jusuf atau Presiden Soeharto menginginkan perbaikan dalam tubuh militer seperti suksesi yang dilakukan oleh Muhammad Jusuf di Departemen Perindustrian.

Selama menjabat sebagai Menhankam Muhammad Jusuf mengeluarkan beberapa aturan bagi ABRI. Salah satunya yaitu pelarangan terhadap anggota ABRI dalam Golkar. Muhammad Jusuf mulai menata jarak antara ABRI dan Golkar. Hal ini karena ABRI dianggap terlalu dominan dalam Golkar atau dapat dikatakan bahwa ABRI terlalu banyak terjun dalam dunia politik (tersedia: www.Merdeka.com, [23 februari 2016]). Kebijakan yang dikeluarkan oleh Muhammad Jusuf tersebut sangat tidak sesuai dengan tujuan dari pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru yang berniat menjadikan Golkar sebagai kendaraan politiknya justru di jauhkan dari ABRI atau militer. Pemerintah Orde Baru sangat kental dengan peran serta militer dalam politik dan Golkar.

Dalam menjabat sebagai Menhankam Muhammad Jusuf juga dianggap sangat dekat dengan para prajuritnya. Muhammad Jusuf sering mengunjungi barak-barak dan juga membangun fasilitas untuk kemajuan dunia militer

Indonesia. Muhammad Jusuf juga berperan sangat aktif dalam menjaga keamanan dari pemerintahan Orde Baru (Kasenda, 2013, hlm 42). Namun berkat peran dan juga kepopulerannya yang sangat baik mengakibatkan kecemburuan berbagai pihak termasuk Presiden Soeharto. Muhammad Jusuf dianggap menyaingi kepopuleran dari Presiden Soeharto serta beredar isu bahwa Muhammad Jusuf akan diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa Muhammad Jusuf adalah sosok yang paling tepat untuk menggantikan Presiden Soeharto sebagai Presiden.

Pada tahun 1983, Muhammad Jusuf dipindah tugaskan menjadi Ketua Badan Pemerikasaan Keuangan. Penempatan Muhammad Jusuf sebagai Ketua BPK dianggap oleh beberapa pihak sebagai suatu tindakan pembuangan Muhammad Jusuf ke luar dari roda eksekutif. Meskipun Muhammad Jusuf tidak lagi berada di eksekutif namun, tetap memiliki kaitan dengan pemerintahan. Dalam menjabat sebagai ketua BPK, Muhammad Jusuf memiliki tugas untuk memulihkan wibawa lembaga tersebut. Karena pada masa sebelumnya lembaga tersebut dianggap sebelah mata meskipun telah ada Undang-undang yang mengaturnya. Untuk itu Muhammad Jusuf melakukan beberapa langkah untuk mengembalikan wibawa BPK. *Pertama*, menegakan wibawa dan martabat Badan Pemerikasaan keuangan. *Kedua*, memperbaiki hasil *Out Put* dalam format hasil pemerikasaan tahunan. *Ketiga*, memberi harga dan kesejahteraan yang lebih baik kepada staf dan karyawan BPK (Disjarah TNI AD, 2013, hlm 122-125)..

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji mengenai peranan dari Muhammad Jusuf ini. Penulis merasa peranan Muhammad Jusuf ini sangatlah penting dalam kehidupan politik Orde Baru. Penelitian ini juga merupakan lanjutan dari penelitian terdahulu mengenai peranan Ali Moertopo dalam kebertahanan Pemerintahan Soeharto 1969-1982. Pada penelitian tersebut menjelaskan peranan Ali Moertopo dalam mempertahankan Pemerintahan Soeharto. Hal yang membuat penulis semakin tertarik untuk mengkaji ini karena hubungan antara Muhammad Jusuf dan Presiden Soeharto yang pasang surut.

Serta peran serta Muhammad Jusuf dalam berbagai bidang dari mulai militer, perindustrian dan pemeriksaan keuangan. Oleh karena itu, penulis menuangkan pemikirannya dalam judul “**Peran Muhammad Jusuf dalam Politik Orde Baru 1966-1993**”. Mengenai pembatasan periode dalam penelitian ini, penulis beranggapan bahwa ketika tahun 1966 merupakan awal dari Muhammad Jusuf diangkat sebagai Menteri Perindustrian. Muhammad Jusuf menjabat sebagai Menteri Perindustrian selama 2 periode yaitu 1966-1973 dan 1973-1978. Sedangkan penulis membatasi periode 1993 karena pada tahun tersebut Muhammad Jusuf menyelesaikan masa baktinya sebagai Ketua Badan Pengawasan Keuangan (BPK).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyusun batasan masalah yaitu “*Bagaimana Peranan Muhammad Jusuf dalam Politik Orde Baru Tahun 1966-1993*”?

Untuk memfokuskan permasalahan yang dikaji lebih jelas dan terarah, maka penulis memaparkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang kehidupan Muhammad Jusuf?
2. Bagaimana peranan Muhammad Jusuf sebagai Menteri Perindustrian dalam penataan Perindustrian tahun 1966-1978?
3. Bagaimana peranan Muhammad Jusuf dalam bidang Militer Indonesia tahun 1978-1983?
4. Bagaimana peranan Muhammad Jusuf dalam perpolitikan Indonesia tahun 1983-1993?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran umum latar belakang kehidupan Muhammad Jusuf sebelum menjabat sebagai Menteri Perindustrian.
2. Untuk menganalisis tindakan serta kebijakan yang diambil oleh Muhammad Jusuf dalam penataan Perindustrian tahun 1973-1978.

3. Untuk mendeskripsikan peranan Muhammad Jusuf dalam bidang Militer Indonesia tahun 1978-1983.
4. Untuk mendeskripsikan mengenai peranan Muhammad Jusuf dalam perpolitikan Indonesia tahun 1983-1993.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Menambah khasanah penelitian di Indonesia tentang alam Orde Baru 1966-1993.
2. Menggambarkan peranan Muhammad Jusup dalam politik Orde Baru tahun 1966-1993, serta dapat menambah informasi mengenai peranan tokoh-tokoh pada masa Orba yang bertahan selama 32 tahun.
3. Dapat dijadikan sebagai sumber referensi khususnya mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah berkaitan dengan mata Kuliah Sejarah Orde Baru dan dijadikan sebagai sumber referensi bagi siswa dan guru mata pelajaran sejarah Indonesia yang berkaitan dengan KD. 3.8 Mengevaluasi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan pada masa Orde Baru dan Reformasi.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Adapun struktur organisasi skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah penelitian. Bab ini disertai mengenai ketertarikan penulis dalam memilih permasalahan yang diangkat. Untuk lebih memfokuskan pembahasan, pada bab ini juga berisikan rumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori, sumber buku serta sumber-sumber lain yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan yang relevan dengan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisikan mengenai langkah-langkah, metode, pendekatan dan teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam

Asri Riani Dewi, 2016

PERANAN MUHAMMAD JUSUF DALAM POLITIK ORDE BARU 1966-1993

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

melakukan penelitian. Hal ini dilakukan penulis untuk mendapatkan sumber yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang dikaji oleh penulis. Tahapan ini meliputi heuristik, yaitu proses pengumpulan data. Kritik, yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan dari sumber yang telah didapatkan, kritik dilakukan secara eksternal dan internal. Interpretasi, yaitu proses penafsiran fakta-fakta yang telah ditemukan. Sedangkan tahap terakhir dinamakan historiografi, yaitu kegiatan penulisan dan proses penyusunan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. selain itu, pada bab ini juga penulis menguraikan langkah-langkah yang ditempuh penulis selama melaksanakan proses penulisan skripsi ini.

Bab IV Pembahasan, bab ini dapat dikatakan isi utama dari penulisan skripsi ini karena didalamnya berisi pembahasan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dari proses pengolahan serta analisis yang telah dilakukan terhadap fakta-fakta yang telah diperoleh

Bab V Simpulan dan rekomendasi, bab ini merupakan bab terakhir dari rangkaian penulisan skripsi ini. Pada bab ini terdapat penafsiran penulis dari hasil analisis dan temuan yang didapatkan. Kemudian disajikan dalam bentuk Simpulan. Simpulan ini merupakan jawaban dari pertanyaan pada bab-bab sebelumnya.

